



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI  
KE PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**RESES MASA PERSIDANGAN III  
TAHUN SIDANG 2017-2018  
TANGGAL 20-23 FEBRUARI 2018**

**KOMISI VII  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2018**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Letak Provinsi Kalimantan Utara berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Sulawesi di sebelah timur, Negara Bagian Sabah (Malaysia) di Utara, Negara Bagian Serawak (Malaysia) di barat, serta Provinsi Kalimantan Timur di selatan. Kondisi wilayah terbagi atas daratan yang berada di Pulau Kalimantan dan Kepulauan yang berada di perairan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) adalah provinsi yang ke-34 yang terbentuk dari pemekaran Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU No.20 tahun 2012. Posisi geografis Provinsi Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia membuat provinsi ini berada di lokasi strategis terutama dalam pertahanan dan keamanan negara, dan Kaltara juga berada di jalur pelayaran internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia/Archipelagic Sealand Passage) dan merupakan pintu keluar/outlet ke Asia Pasifik. Wilayah ini terdiri dari 5 kabupaten/kota, meliputi 4 Kabupaten dan 1 Kota. Jumlah kecamatan 50 dan desa 479. Luas lautan 11.579 km<sup>2</sup> sedangkan Luas daratan Kaltara 75.467,70 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk 666.333 jiwa (2016).

Kaltara terkenal dengan Cekungan Tarakan yang mempunyai potensi minyak dan gas bumi dimana sebagian besar masih dalam taraf penyelidikan eksplorasi, dan sebagian kecil sudah berproduksi seperti di Pulau Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan. Cekungan Tarakan juga mempunyai potensi batubara yang melimpah. Penambangan batubara sudah dilakukan di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan.

Potensi sumberdaya mineral khususnya emas secara informasi tidak resmi terdapat di Kabupaten Nunukan yang diperkirakan mempunyai cadangan cukup besar, namun belum dikelola dengan baik. Penambangan sumberdaya mineral khususnya emas harus memperhatikan masalah lingkungan yang terkait dengan pencemaran unsur unsur berbahaya seperti As dan Hg terhadap air tanah maupun air permukaan.

Kaltara juga memiliki potensi hidrokarbon/migas yang cukup besar. Eksplorasi migas terus dikembangkan disamping eksploitasi yang telah berjalan sejak masa sebelum kemerdekaan RI. Saat ini PT Pertamina (Persero) dan beberapa perusahaan lainnya melakukan operasi pertambangan di Wilayah Kaltara. Untuk itu dipandang perlu Komisi VII DPR RI melakukan pengawasan dan peninjauan secara langsung terhadap aktivitas eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemanfaatan Migas di Kaltara.

Sebagaimana daerah lainnya, saat ini pembangunan di bidang energi di Kaltara masih kesenjangan antara peningkatan kebutuhan dan konsumsi energi dengan ketersediaan energi siap pakai. Sumber daya energi merupakan sarana produksi dan sarana kehidupan sehari-hari yang memegang peran penting dalam pembangunan. Ketersediaan energi yang berkesinambungan, handal, terjangkau dan ramah lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan, baik secara nasional maupun di daerah. Energi terbarukan sangat potensial di Kaltara. Data potensi PLTA tidak kurang dari 9000 MW. Masalah infrastruktur, pengembangan wilayah dan pemenuhan kebutuhan listrik juga menjadi prioritas bagi pembangunan di Provinsi Kaltara. Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat sejalan dengan berkembangnya roda pembangunan perekonomian daerah dan bertambahnya pengguna listrik rumah tangga. Sebanyak 306 desa di Provinsi Kalimantan Utara belum menikmati aliran listrik. Rasio elektrifikasi provinsi termuda di Indonesia ini baru mencapai 68,94%. Kabupaten Nunukan merupakan daerah dengan rasio desa terlistriki paling rendah (25,83%) dan rasio elektrifikasi 58,34%. Untuk itu, perlu melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang energi dan pemanfaatan sumber daya mineral agar dapat langsung diketahui tentang masalah yang dihadapi dan alternatif solusi yang bisa dilakukan.

Kebutuhan energi listrik di Provinsi Kaltara pada umumnya meningkat seiring dengan pertumbuhan daerah, apalagi ini merupakan daerah yang sedang melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah. Dalam percepatan pembangunan diperlukan pasokan sumber energi listrik untuk mencukupi kebutuhan tersebut, termasuk diantaranya dengan pembangunan pembangkit listrik baru beserta jaringannya. Gubernur Kalimantan Utara Dr. Irianto

Lambrie dalam pernyataan resminya (9/11/2017) meminta PT PLN (Persero) untuk lebih memperhatikan kondisi kelistrikan di daerah-daerah Kaltara yang masih sering padam. Utamanya byarpett di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, dan Nunukan. PLN diminta segera menyelesaikan pembangunan PLTU dan PLTMG di Tanjung Selor. Saat ini PT PLN (Persero) selain mempercepat pembangunan pembangkit, PLN juga diminta menyebar PLTD di daerah-daerah krisis listrik sebagai solusi jangka pendek.

Pemanfaatan energi gas alam di Kaltara juga perlu dikembangkan. Saat ini PT PGN (Persero) telah mengelola jaringan gas di Kota Tarakan untuk rumah tangga. Tingginya permintaan warga terhadap jaringan gas di Kota Tarakan perlu mendapat dukungan dari Komisi VII DPR RI. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan peninjauan langsung terhadap kondisi jaringan gas dan potensi pengembangannya di Kaltara.

Selain itu, sebagai provinsi termuda, Provinsi Kaltara juga perlu memanfaatkan dan mengembangkan riset dan teknologi untuk akselerasi pembangunan dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait. Ristek juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pengembangannya. Hal penting yang juga harus diperhatikan adalah tentang perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan dan pengembangan wilayah di Provinsi Kaltara, agar ke depan tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat salah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk menjadikan Provinsi Kaltara sebagai lokasi kunjungan pada reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 – 2018. Kunjungan ini dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan merupakan kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah serta *stakeholder* lainnya. Dengan kunjungan kerja ini dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi serta membawa informasi dan data terkait bidang – bidang kerja Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan fungsinya.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib beserta Perubahannya.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA**

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan serta menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi di Kalimantan Utara.

Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Kalimantan Utara khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah.

## **D. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan)

2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan.
3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya.
4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat Komisi VII DPR RI.

#### **E. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN**

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi, Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI, Sekretariat Komisi VII DPR RI, *sebagaimana daftar dalam lampiran*. Selain itu juga didampingi oleh mitra kerja Komisi VII DPR RI.

## **BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. LOKASI KUNJUNGAN, WAKTU DAN KEGIATAN**

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan pada tanggal 20 – 22 Pebruari 2018. Sedangkan kegiatan Kunjungan Kerja sebagai berikut:

1. Peninjauan ke PLTU /PLTMG Tanjung Selor dilanjutkan dengan Rapat tentang Ketenagalistrikan di Kaltara yang dihadiri oleh Rombongan Komisi VII DPR RI, Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT. PLN (Persero), Sekdaprov Kaltara, Bupati Bulungan, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltara, Kepala Dinas LHK Provinsi Kaltara, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian Ristekdikti, LIPI, BIG dll.
2. Pertemuan membahas Migas di wilayah Prov. Kaltara yang dihadiri oleh: Kementerian ESDM RI, Komite BPH Migas, Sekretaris SKK Migas, Direksi PT Pertamina (Persero), Direktur PT. Pertamina EP, Direktur PT. Pertamina Hulu Energi (PHE), Direksi PT. PLN (Persero), Direksi PT. PGN (Persero) Tbk, DPRD dan Pemprov Kaltara bertempat di Hotel Swissbell, Tarakan.
3. Peninjauan ke SPBU Pertamina, Penjual BBM eceran dan pangkalan LPG di Kota Tarakan bersama GM MOR VI Wilayah Kalimantan PT Pertamina (Persero).
4. Pertemuan dan Peninjauan ke Obyek Vital Hulu Migas PT. Pertamina EP Asset V Tarakan Field bersama Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) dan Direksi PT Pertamina EP beserta jajarannya, Direksi PT Pertamina HE, JOB Medco EP, SKK Migas, Direktur PT PLN (Persero), DPRD dan Pemprov Kaltara.
5. Pertemuan dan Peninjauan jaringan gas di Kota Tarakan bersama Direksi PT. PGN (Persero), Direktur Hulu PT Pertamina (Persero), Pemkot Tarakan, SKK Migas, Komite BPH Migas, DPRD dan Pemprov Kaltara.

## **B. RANGKUMAN PAPARAN DARI MITRA KERJA**

### **1. PT PLN (PERSERO)**

Dalam paparannya, PLN menyampaikan sbb :

- a. PLN mengalami hambatan dalam pembangunan PLTU Tanjung Selor tentang masalah lahan dan penyediaan mesin boiler. Masalah lahan bisa diatasi atas bantuan pemerintah daerah. Masalah boiler dapat diatasi dengan mendatangkan boiler dari Kuala Tungkal Jambi karena tidak jadi dibangunnya PLTU di Jambi.
- b. PLN akan meneruskan pembangunan jaringan sutet dari Kaltim untuk diteruskan hingga Kaltara mengantisipasi pembangunan PLTU dan PLTMG yang akan selesai awal tahun 2019.
- c. Kapasitas pembangkit di Kaltara masih dapat memenuhi kebutuhan listrik di Kaltara saat ini, namun gangguan jarringan sering menjadi penyebab terjadinya pemadaman listrik.
- d. Kebutuhan listrik di Kaltara perlu di tingkatkan seiring dengan pembangunan pembangkit baru di Kaltara. Karena ada potensi kelebihan pasokan yang cukup besar jika tidak ada kawasan industry yang dapat menjadi pengguna listrik PLN.

### **2. SKK MIGAS**

Dalam paparannya, SKK Migas menyampaikan sbb:

- a. Wilayah Kerja (WK) Eksplorasi di daerah Kaltara terdiri dari 7 WK beserta perusahaan PSC-nya yaitu WK Ambalat oleh Eni Ambalat Ltd, WK Sebatik oleh Star Energy Sentosa (Sebatik) Ltd, WK South Bengara II oleh Caelus Energy Bengara II, WK Offshore Mangkalihat oleh Caelus Energy Mangkalihat Pte. Ltd. WK Bengara II oleh PT Bara dinamina Citra Lestari, WK Est Simenggaris oleh Sonlaw United Corporation, WK East Ambalat oleh PT Pertamina Hulu Energi Ambalat Timur.
- b. Sedangkan WK Eksplorasi beserta perusahaan PSC-nya adalah WK Simenggaris oleh JOB Pertamina – Medco E&P Simenggaris, WK Bengara I oleh PT Medco E&P Bengara, WK Nunukan oleh PT PHE Nunukan Company.



### 3. PT PERTAMINA (PERSERO)

Dalam paparannya, PT Pertamina menyampaikan :

- a. Pentingnya Kaltara dalam kaitan dengan energy nasional yaitu
  - Kaltara memiliki potensi migas yang besar. Salah satunya adalah ditemukannya cadangan gas Cekungan Tarakan, Blok Nunukan lokasi Parang 1 oleh Pertamina. Blok ini memiliki 74 MMBO minyak bumi dan 852 BSCF gas bumi atau keseluruhannya sama dengan 221 MMBOE yang menjadi ladang migas terbesar ke 6 di dunia.
  - Karena posisinya yang sangat strategis dan di perbatasan, Kaltara dapat menjadi penggerak ekonomi nasional dan kawasan terutama kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Jika terjadi kelebihan pasokan energi, dapat diekspor langsung ke Negara tetangga.
  - Potensi migas yang banyak terdapat di Kaltara, menjadikan Kaltara memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energy nasional.
  - Kaltara dapat memberikan kontribusi terhadap peran dan tugas Pertamina sebagai tulang punggung industry migas nasional dan BUMN terkemuka dalam membawa misi nasional di tingkat dunia.
- b. Pertamina terus mengoptimalkan eksplorasi migas di Kaltara melalui anak-usahanya PT Pertamina Hulu Energi dan PT Pertamina EP Asset 5.
- c. WK yang dikelola Pertamina yang sudah berproduksi adalah Blok Simenggaris (JOB dengan Medco), Blok Nunukan dan Bunyu-Tarakan Field.
- d. Monetisasi Gas Simenggaris (Sembakung) dalam mendukung penyediaan energy listrik dengan menyalurkan gas ke pembangkit milik PLN di Kaltara yaitu 0,5 MMSCFD untuk PLTMG Tanah Tidung, 5 MMSCFD untuk PLTMG Tanjung Selor dan 8 MMSCFD ke PLTMG mulut tambang 40 MW di WK Simenggaris.

- e. Untuk penyaluran BBM dan LPG, provinsi Kaltara termasuk dalam Wilayah Kerja MOR VI Kalimantan. Jumlah SPBU regular sebanyak 4 unit, SPBU Mini/Modular kompak sebanyak 25 unit, SPBU Nelayan 1 unit, AMT PSO sebanyak 1 unit dan AMT Non PSO sebanyak 5 unit. Tantangan dalam penyediaan dan penyaluran BBM antara lain badai besar, ombak tinggi, draft sungai rendah. Masalah Ketersediaan sarana dan fasilitas serta alat angkutan.
- f. Lokasi BBM satu harga di Kaltara terdapat di Kelurahan Long Bawan , Nunukan yang mulai operasi bulan Juli 2016 dan Kelurahan Salimbatu di Kab. Bulungan yang beroperasi mulai Desember 2017.
- g. Distribusi LPG di Kaltara dilakukan oleh 12 Agen dan terbagi atas pangkalan-pangkalan yaitu Bulungan 118 pangkalan, Tarakan 187 pangkalan, Malinau 8 pangkalan, Nunukan 64 pangkalan dan Tanah Tidung 3 pangkalan. Salah satu hambatan dalam penyaluran LPG yaitu belum tersedianya SPPBE di Kaltara. Selama ini masih di suplai dari SPPBE di Samarinda. Sehingga rentang distribusi sangat jauh dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

#### **4. PT PGN (PERSERO)**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PGN di Kaltara adalah menyediakan jaringan gas bumi (jargas) untuk wilayah Kota Tarakan. Sampai dengan Februari 2018 PGN telah menyalurkan gas untuk rumah sebanyak 23.893 satuan sambungan. Dalam paparannya, potensi PGN untuk menambah satuan sambungan masih sangat terbuka jika didukung oleh APBN, karena sumber gas alamnya siap dibantu oleh Pertamina. Dari wawancara langsung Tim Komisi VII DPR RI dengan pelanggan jargas di Kota Tarakan, masyarakat sangat terbantu dengan keberadaan jargas jika dibandingkan menggunakan BBM atau LPG, terutama karena harga yang lebih murah dan tersedia setiap saat tanpa khawatir kehabisan pasokan.

## 5. HASIL KUNJUNGAN DAN REKOMENDASI

1. Dari hasil peninjauan ke PLTU dan PLTMG Tanjung Selor serta Rapat tentang Masalah Ketenagalistrikan Kaltara, ditemukan permasalahan sbb :
  - a. PLTU Tanjung Selor termasuk dalam proyek Fast Track 1 Penugasan Pemerintah kepada PLN yang cukup lama mangkrak. Baru 2017 dimulai lagi pembangunannya oleh pihak PT Adhi Karya selaku Kontraktor EPC.
  - b. Saat ini PLN sedang membangun PLTMG di lokasi yang sama dengan PLTU Tanjung Selor dengan kontraktor EPC nya adalah PT Wijaya Karya. PLTMG ini akan kurang efisien karena posisinya jauh dari sumber gasnya, sehingga gas yang dikirim harus diubah menjadi LNG terlebih dahulu dan biaya transportasi yang mahal.
  - c. Banyak daerah di Kaltara yang merasakan pelayanan PLN masih sangat buruk karena terjadinya pemadaman listrik yang terus terjadi. Bahkan untuk Kota Tarakan hampir setiap hari terjadi pemadaman. Menurut PLN, kapasitas PLTD cukup namun kondisi jaringan sering mengalami gangguan, terutama gangguan alam. Namun alasan ini tidak memuaskan masyarakat dan pemerintah daerah setempat karena terjadi hamper setiap hari.
  - d. Beberapa daerah hingga saat ini belum menikmati listrik sama sekali, seperti kawasan transmigrasi di Kab. Bulungan.
2. Dari hasil peninjauan Obyek vital Hulu Migas Kaltara, ditemukan permasalahan sbb :
  - a. Proses eksplorasi membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga belum semua lokasi dilakukan pengeboran.
  - b. Proses perjanjian jual beli gas dengan pembeli gas (terutama PLN) belum semuanya direalisasikan karena terkait dengan kesiapan pembangkit PLN yang belum selesai dibangun.

3. Dari hasil peninjauan ke SPBU Pertamina, Penjual BBM eceran dan pangkalan LPG, ditemukan permasalahan sbb :
  - a. SPBU Pertamina masih kekurangan premium yang saat ini masih menjadi BBM pilihan utama masyarakat di Kaltara. Namun pada saat yang sama Tim Komisi VII DPR menemukan penjual premium eceran (dalam botol) yang cukup banyak dengan harga diatas dari harga patokan pemerintah.
  - b. Harga LPG 3 kg rata-rata diatas harga eceran pertamina karena pihak pangkalan menjual dengan margin yang cukup besar. Apalagi saat terjadi kelangkaan pasokan LPG harga melambung tinggi. Pengguna LPG 3 kg selain rumah tangga, juga para pedagang makanan keliling dan rumah makan.
  
4. Dari hasil peninjauan jaringan gas kota Tarakan, ditemukan permasalahan sbb :
  - a. Masih banyak rumah tangga di wilayah yang sudah dilalui pipa gas PGN tetapi belum menerima sambungan gas ke rumahnya.
  - b. Perlu dukungan pemerintah dan pemda dalam menambah jaringan gas rumah tangga.

### **BAB III REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil kunjungan kerja ini, Rekomendasi KOMISI VII sbb:

- a. PT PLN (Persero) didesak untuk secepatnya menyelesaikan pemadaman yang masih terus terjadi di Kaltara.
- b. Komisi VII akan mengundang RDP perusahaan Kontraktor pembangunan PLTU/PLTMG di Kaltara untuk mengetahui lebih jauh masalah yang terjadi dalam pembangunan PLTU/PLTMG yang sempat mangkrak atau bermasalah.
- c. PLN segera menindaklanjuti penyaluran listrik untuk daerah-daerah yang hingga saat ini belum menikmati listrik di Kaltara selambat-lambatnya Januari 2019.
- d. PLN harus mengoptimalkan penghematan dalam biaya operasi pembangkit di Kaltara, terutama pembangkit yang dibangun dalam satu lokasi yang sama.
- e. Komisi VII DPR RI mendukung penyediaan energy terbarukan untuk listrik dengan pembangunan PLTA di Sungai Kayan yang memiliki potensi listrik 6000-9000 MW. Jika memungkinkan dilakukan Kunjungan spesifik ke Lokasi PLTA tersebut.
  
- f. PT Pertamina dan PLN segera mempercepat penandatanganan kontrak gas untuk PLTMG di Kaltara.
- g. Pertamina mengoptimalkan eksplorasi migas di Kaltara untuk memperkuat ketahanan energy nasional.
- g. Pertamina perlu merencanakan pembangunan Depo BBM dan SPBBE di Kaltara untuk mengantisipasi kelangkaan BBM dan LPG di Kaltara.
- g. Pertamina perlu membina para penjual BBM eceran dan pada waktu mendatang meminta mereka untuk menjual BBM non subsidi. Karena penjualan BBM bersubsidi hanya bisa dilakukan oleh SPBU atau agen resmi Pertamina.
- h. Kementerian ESDM perlu menambah alokasi anggaran jargas kota untuk rumah tangga, mengingat kebutuhan jargas rumah tangga terus meningkat.

## **BAB IV PENUTUP**

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara ini dengan harapan hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan baik dan kemudian akan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat di Kaltara.

Jakarta, 24 Februari 2018

**Pimpinan Komisi VII DPR RI**

**Dr. Ir. H. E. HERMAN KHAERON, M.Si**